**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara dibelahan dunia maupun Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomena dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasialan pemerintah negara dari waktu kewaku, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang memasuki kategori berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah. Bahkan menjadi *masterplan* perencanaan pembangunan dalam jangka panjang untuk meningkatkan perekonimian dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tentu sudah lumrah di ketahui bahwa jika berbicara tentang kemiskinan tentu akan berbicara mengenai pembangunan, mengingat tren ini adalah dua sumbu yang tak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembangunan adalah suatu adalah suatu proses pertumbahan menuju arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yang mewujudkan masayrakat indonesia yang berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan pembangunan nasional sendiri sebgaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan pemerintah indonesia demi tercapainya kesejahteraan Masyarkat

dapat di sebut sejahtera apabila masyarakat tersebut telah dapat memenuhui kebutuhan hidupnya secara mandiri. Permasalahn yang dihadapi oleh banyak negara yang menyangkut kesejahteraan masyarkat adalah ketidakmampuan masyarkat dalam memenuhu kebutuhan hidupnya secara mandiri (Sri, 2010; 358-366). Kesejahteraan dapat diartikan salah satunya dengan tingkat kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteran penduduk.

Menurut para ahli ekonomi (Arsyad, 2010: 299) kemiskinan Indonesia bersifat multidimensial. Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya bersifat primer dan aspek skunder. Aspek primer berupa miskin asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek skunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dilain sisi kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan tingkat pendidikan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaanya untuk berpartipasi dalam pembangunan serta berbagai serta berbagai masalah yang berkenan dengan pembangunan manusia. Dimensi -dimensi kemiskinan tersebut termanifasetasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumuhan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Wijaya, 2005:215-225) Pemerintah Negara seringkali di tunjuk sebagai yang bertanggung jawab atas kemiskinan rakyatnya, karena harusnya Pemrintah Negara mampu membangun berbagai regulasi berkaitan dengan subsidi, kuota dan daya terhadap pemanfaatan eksternal. Sudah berbagai upaya disini yang di lakukan pemerintah indoneisa untuk mengatasi masalah kemiskinan itu sendiri adapun langkah yang di lakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang melanda indonesia, (Irhamni, 2017). Pada umum nya dilakukan pembangunan berkelanjutan yang di bantu oleh lembaga-lembaga internasional seperti *United Nations Developmen Program (UNDP).*

Kegiatan *United Nations Developmen Program(UNDP)* program sebagai lembaga programe Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berusaha untuk mengatasi masalah kemiskinan yang merebak di negara-negara berkembang, upaya pencapaian *Sustainable development goals (SDGs).*  Yang merupakan agenda global yang melanjutkan upaya dan pencpaian agenda sebelumnya yaitu *Melenium Development goals (MDGs)*. (undp-pengertian-tujan,-kepanjangan-undp)

Selama ***50*** tahun terakhir, UNDP telah bekerja untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mendorong pembangunan manusia. Kami berada di 177 negara wilayah, dan menawarkan persepektif global dan wawasan lokal untuk membantu masyarakat memperbaiki kehidupan mereka. UNDP telah mendukung pembangunan di indonesia sejak tahun 1970. Sejak tahu 90-an, UNDP telah mendukung indonesia dalam transisi menuju demokrasi dan reformasi ekonomi. UNDP juga telah mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan kebijakan untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan jangka panjang, dan telah membantu mengetaskan kemiskinan dan mengurangi, kerentanan. Ketika bencana melanda, seperti pada bulan Desember 2004, UNDP bekerja dengan para mitra untuk memberikan bantuan Dan melaksanakan kegiatan pemuliahan, serta membangun ketahanan dan manajemen resiko yang lebih baik. UNDP percaya bahwa masyarkat Indonesia harus mempunyai kepemilikan atas program dan proyek yang kami dukung. Karena itu, seluruh program UNDP secra aktif mempromosikan semangat saling menghormati, mendukung, bertanggung jawab, dan meyakini prinsip kepemilikan nasional seperti yang tercantum dalam Jakrta *Commitment-* sebuah deklarasi yang dinyatakan oleh pemerintah dan para mitra pembangunannya pada 2009 untuk memperkuat evektivitas bantuan di Indonesia. Dengan semangat kepemilikan nasional, seluruh bantuan UNDP di Indonesia dilaksanakan oleh entitas nasional, termasuk jajaran kementrian dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dan pada level daerah bantuan dilaksanakan oleh jajaran departemen, pemegang otoritas provinsi dan kota, termasuk juga kelompok komunitas.

UNDP bekerja sama erat dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat madani, sektor swasta, dan masyarakat di seluruh indonesia. Sebagai bagian dari sistem PP, UNDP bekerjasam atau berkoordinasi dengan badan badan PBB lainnya. Bantuan UNDP juga mendapatkan dampak  *positive* yang lebih kuat pada pembangunan Indonesia dan kehidupan masyarakat.

**Pembangunan di Indonesia**

Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Indonesia sekarang adalah negara yang bepenghasilan menengah, dan memiliki GNI per kapita sebesar **USD9778.** Ekonomi Indonesia sekarang adalah 16 terbesar di dunia. Pembangunan manusia di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Indeks pembangunan manusis (IPM) meningkat dari **0,474** di tahun 1980 menjadi **0,684** pada tahun 2014, membuat negara ini menjadi salah satu dari sepuluh besar di dunia dalam kemajuan pembangunan manusia dan menempatkannya dalam kategori pembangunan manusia menengah, Indonesia juga telah melakukan bebagai upaya menuju Tujuan pembangunan Milenium, dengan pencapaian siignifikan di bidang pengurangan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Antara tahun 2000 dan 2015, proposi penduduk indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional turun dari 19 persen menjadi dibawah 11 persen.

Namun kemajuan tidak merata dan tetap di tandai dengan kesenjangan antar daerah, perkotaan dan pedesaan, dan gender yang signifikan. Masih ada 28juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dan lebih banyak lagi tidak mempunyai akses ke pelayanan sosial dasar. Di wilayah Papua, tingkat kemiskinan dua kali rata-rata nasional. Cukup banyak penduduk tidak mempunyai akses ke layanan dasar. Hanya 68 persen populasi memiliki akses ke air minum yang aman dan bersih dan 61 persen untuk sanitasi, terutama mereka yang berada di pusat-pusat kota. Perempuan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan, dan bernagai layanan. Antara tahun 2002 dan 2013, ketimpangan pendapatan meningkat sebesar 24 persen dan koefisien gini telah memburuk dari **0,413** ke **0,329** pada tahun 2002.

Pembangunan jangka panjang di Indonesia terancam oleh degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Pertumbuhan ekonomi sebagian besar telah di dorong oleh ekstrasi sumber daya alam dengan mengorbankan lingkungan. Indonesia juga merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, dan merupakam salah satu negara dengan tingkat deforestasi yang tertinggi di dunia.

Bagi Indonesia, tantangannya sekarang adalah untuk menghasilkan pertumbuhan yang di butuhkan untuk mengurangi **kemiskinan** dan **kesenjangan** dan pada saat yang sama melindungi sumber daya alam dan perospek pembangunan jangka panjang.

SDGS mengakomodasikan masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitas (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGS). Maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya. SDGS juga bersifat Universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh Negara- baik Negara maju, Negara berkembang, dan Negara kurang berkembang.

SDGS membawa 5 prinsip-perinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi Ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu (1) *People*  (Manusia), (2) *planet* (Bumi), (3) *prosperity* (Kemakmuran), (4) *peace* (Perdamaian), dan (5) *partnership* (Kerja sama). Kelima dasar ini di kenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik dan menghapus kemiskinan.

**Kemitraan UNDP- INDONESIA SDGs**

Pada bulan September 2015, Dewan Eksekutif UNDP menyetujui *country progrmme* baru untuk Indonesia 2016-2020. Di bawah program yang baru ini dan sejalan dengan prioritas Pemerintah, UNDP mendukung Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan dan mencapai SDGs. UNDP dan berbagai mitranya bekerjasama untuk memaksimalka sinergi antra SDGs dan strategi pembangunan nasional, khususnya Nawacita dan RPJMN

1. **Mengurangi kemiskinan dan Kesenjangan**

Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan akan tetap menjadi bidang utama kegiatan UNDP. Di tingktat kebijakan, penelitian dan analisis akan dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dan merumuskan rekomendasi, dengan mempertimbangkan konteks Nasionl dan lokal serta pengalaman internasional terkini. Kegiatan Kebijakan UNDP akan mendapat masukan dari proyek-proyek di tingkat akar rumput yang berfokus pada Perempuan miskin, dan hampir miskin- terutama yang berada di daerah pedesaan -dan orang-orang miskin yang bergantung pada hutan yang hidup dengan kurang dari **USD2** Per hari. Sekitar 17 juta petani swadaya akan diprioritaskan. UNDP akan memprioritaskan Provinsi-Provinsi yang tertinggal dalam pembangunan manusia, terutama Nusa Tenggara Timur dan Papua. Di Papua dan Papuan Barat dengan dukungan dari Selandia baru, UNDP berkontribusi terhadap terhadap pembangunan ekonomi lokal melalui program pengembangan keterampilan yang membantu memulai dan menghidupkan kembali usaha lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk asli, mayoritas perempuan miskin.

1. **Migitasi dan adaptasi perubahan United Nations Development Programe Indonesia**

UNDP mendukung pengelolaan sumber daya alam untuk melindungi hitan tropis yang luas, laut yang kaya dan keaenkargaman hayati yang unik di Indonesia. Sebuah program utama adalah pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD +) yang di biyayai oleh Norwegia. UNDP juga mendukung strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia (2015-2020).di sektor energi, UNDP memberikan saran kebijakan dan melaksanakan proyek percontohan untuk akses ke energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. UNDP mendukung perumusan standar efisiensi energi Nasional dari Indonesia Green Economy Model (I-GEM), sebuah model yang bertujuan untuk memberikan masukan perencanaan kebijakan untuk transisi jangka panjang dari Ekonomi coklat ke pembangunan rendah karbon.

1. **Kondisi demokrasi dan akses terhadap keadilan**

Tata kelola pemrintah adalah inti mandat UNDP dan tetap menjadi bidang penting bagi pembangunan Indonesia. Untuk penguatan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia yang telah didukung UNDP bekejasama dengan Pemerintah Australia akan digunakan untuk meningkatkan kebebasan sipil, hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.

UNDP bekerja dengan pemerintah untuk menguatkan aturan hukum dan Akses terhadap Keadilan dan melindungi hak-hak kelompok rentan. Sampai tahun 2019, dengan kemitraan antara UNDP, Uni Eopa, dan Mahkamah Agung, dukungan disediakan untuk membangun kapasitas hakim, meningkatkan transpransi dalam fungsi pengadilan, dan meningkatka kualitas layanan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. UNDP juga mendukung perbaikan sistem perdilan di Aceh, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah, untuk membuatnya lebih sesuai dengan standar hak asasi manusia Internasional dan Perundang-Undangan Nasional. Sistem peradilan adat seringkali merupakan satu-satunya Platfrom yang tersedia bagi masyarakat yang terpinggirkan, terutama di daerah terpencil, untuk menyelesaikan perselisihan dan mendapatkan ke adilan.

1. **Mendukung keterlibatan Indonesia dalam Isu-Isu dan Kerjasama Selatan-Selatan**

Sebgai Negara ekonomi baru dan penyediaan kerja sama pembangunan, Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan global. UNDP bekerjasama dengan pemerintah untuk mendukung keterlibatan Internasional Indonesia, khususnya untuk agenda 2030, kemitraan Global untuk Kerjasama Pembangunan yang Efektif dan G20. Bersama dengan Norwegia, UNDP mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektifitas Kerjasama Selatan-Selatan melalui penyediaan rekomendasi berkembang. UNDP mendukung perumusan arah strategi Kerjsama Selatan-Selatan, penguatan kerangka peraturan dan pembangungan kelembagaan. Bersama Indonesia dan negara-negara mitra, UNDP terlibat pengetahuana Idonesia. (“UNDP Indonesia Partnerships for the SDGs-edited,” n.d.)

**2. Identifikasi Maslah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “kerjasama Indonesia dan UNDP dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia dengan masalah pokok peneliti yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerja sama Indonesia dan *United Nations Development program* (UNDP) dalam penurunan angka kemiskinan di indonesia.
2. Bagaimana *United Nations Development program* (UNDP) menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
3. Bagaimana Implikasi *United Nation Development Program* (UNDP) dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) guna untuk penurunan angka kemiskinan di Indonesia .

**2.1. Pembatasan Masalah**

Mengingat luas nya permasalahan yang di paparkan, maka penulis akan membatasi dengan menitik beratkan pada kerja sama Indonesia dan **UNDP** dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015-2018 mengacu pada **SDGs** ke- 1 (*No poverty)*

**2.2.Perumusan Masalah**

Agar memudahkan penulis dalam menganalisis penelitian, maka di perlukan adanya rumusan masalah yang berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah di paparkan penulis, dan juga agar dalam pengembangan masalah tidak menyimpang dari topik yang di bahas. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **“ Bagaimana Kerja sama Indonesia dan *United Nation Development Program* (UNDP) dalm penurunan angka kemiskinan di Indonesia melalui penerapan SDGs?**

**3.Tujuan dan Kegunaan Peneliti**

**3.1.Tujuan Penelitian**

Diharapakan tujuan penelitian yang di dapatkan dari penulis, adalah:

1. Untuk menegetahui bagaimana kerja sama Indonesia dan *United Nations Development Program* (UNDP) dalam menurunkan angka kemiskinan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana *United Nations Development Program* (UNDP) menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implikasi *United Nations Development Program* (UNDP) dalam pembangunan berkelanjutan guna untuk penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

**3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini untuk penulis, adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai kerjasama Indonesia dan *United Nations Development Gols* (UNDP) dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk membantu mahasiswa yang lainnya dalam mengetahui hal ini dan menjadikannya sebagai referensi
3. Sebagai syarat untuk menempuh ujian program setara satu (S1), dan mendapatkan gelar sarjana ilmu politik (S.IP) pada jurusan Hubungan Internasional (HI) Universitas Pasundan